KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pemerintah wacanakan Bahasa Inggris jadi mata pelajaran wajib di SD
Tanggal : Jumat, 13 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pemerintah Wacanakan Bahasa Inggris Jadi Mata Pelajaran Wajib Di SD

Mulai tahun ajaran 2027/2028, Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sederajat, khususnya kelas III hingga kelas VI. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 13 Tahun 2025.

Untuk mendukung penerapannya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan program pelatihan bagi 100.000 guru yang akan mengajar Bahasa Inggris di sekolah dasar.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD, Dikdas, dan PNFI), Gogot Suharwoto, mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan pelatihan tersebut.

"Saat ini tengah kita siapkan pelatihan untuk guru, targetnya 100.000 guru, ya," kata Gogot di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jumat (6/11/2026).

Mata pelajaran Bahasa Inggris wajib tersebut akan diterapkan mulai kelas III dan diberlakukan secara bertahap pada setiap angkatan.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa pembelajaran Bahasa Inggris di tingkat SD tidak akan terlalu menitikberatkan pada penguasaan tata bahasa (grammar).

Sebaliknya, pembelajaran akan lebih diarahkan pada peningkatan kepercayaan diri dan kemampuan siswa berkomunikasi menggunakan bahasa internasional tersebut.

"Pembelajaran Bahasa Inggris di tingkat SD lebih banyak ditekankan pada aspek bagaimana mereka dapat berkomunikasi dengan Bahasa Inggris, bukan Bahasa Inggris sebagai science, tapi Bahasa Inggris sebagai media komunikasi sehingga nanti di tingkat SD itu grammar-nya tidak perlu terlalu banyak," kata Mu'ti.

Rencana penerapan kebijakan ini mendapat respons beragam dari kalangan legislatif dan pemerhati pendidikan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, di tengah perkembangan global yang semakin cepat, penguasaan bahasa Inggris menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penerapan kebijakan tersebut harus didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana, ketersediaan buku pelajaran, serta tenaga pendidik yang kompeten dan merata di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, memberikan catatan kritis. Ia menilai Pemerintah tidak boleh memaksakan kebijakan tersebut berlaku seragam di seluruh sekolah tanpa terlebih dahulu memperhatikan perbedaan kondisi dan kemampuan masing-masing satuan pendidikan.

Menurutnya, kesenjangan fasilitas dan distribusi guru antara sekolah di perkotaan dan wilayah pelosok masih menjadi persoalan serius. Tanpa kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendidikan yang memadai, kebijakan tersebut berisiko tidak berjalan efektif.

Untuk mengupas wacana penerapan Bahasa Inggris di SD sebagai mata pelajaran wajib, berikut pandangan Lalu Hadrian Irfani, dan Ubaid Matraji di bawah ini.

LALU HADRIAN IRFANI, Wakil Ketua Komisi X DPR

Kemampuan Bahasa Menjadi Hal Penting



"Jika kebijakan tersebut memang akan diterapkan, konsekuensinya seluruh sarana dan prasarana pendukung harus dipastikan siap.

Bagaimana pandangan dan respons Anda terhadap wacana kewajiban pembelajaran bahasa Inggris bagi siswa sekolah dasar (SD)?

Kebijakan tersebut masih sebatas wacana dan belum kami bahas.

Kapan dibahasnya?

Insyaallah, pada 25 November mendatang, kami akan membahasnya bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

Menurut Anda, apakah kebijakan ini baik?

Menurut saya, gagasan ini bagus karena melihat perkembangan situasi global saat ini, kemampuan berbahasa menjadi kebutuhan penting. Tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa Inggris dan bahasa-bahasa asing lainnya.

Apakah kewajiban belajar bahasa Inggris sejak SD, khususnya mulai kelas III, tidak akan membebani siswa?

Usulan untuk mulai memperkenalkan bahasa Inggris kepada anak-anak sejak kelas III SD juga merupakan langkah yang baik dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar lebih bermutu dan berkualitas.

Namun, ada sejumlah hal yang perlu kami tanyakan kepada Menteri. Jika kebijakan tersebut memang akan diterapkan, konsekuensinya seluruh sarana dan prasarana pendukung harus dipastikan siap.

Tenaga pengajarnya juga harus tersedia dan memiliki kompetensi yang memadai. Pemerintah harus memastikan kesiapan serta pemerataan guru bahasa Inggris di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, ada rencana melatih sekitar 100.000 guru untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut.

Dengan rencana penerapan pada 2027, apakah waktu persiapan sekitar satu tahun cukup untuk memastikan kesiapan kebijakan ini?

Karena itu, pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap. Kajian yang komprehensif juga diperlukan agar kebijakan ini benar-benar matang sebelum diterapkan.

Hal-hal tersebut nantinya akan kami tanyakan kepada Mendikdasmen, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, ketersediaan buku pelajaran, hingga kesiapan tenaga pendidik.

Jangan sampai kebijakan sudah ditetapkan, tetapi berbagai kebutuhan pendukungnya belum siap. Pemerintah harus memastikan seluruh aspek tersebut terpenuhi agar pelaksanaannya berjalan optimal. ■ REN

UBAID MATRAJI, Koordinator Nasional JPPI

Pemerintah Jangan Asal Mewajibkan



"Jika dipaksakan berlaku secara nasional tanpa kesiapan dan dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan ini justru akan sia-sia.

Pemerintah melalui Kemendikdasmen berencana mewajibkan pelajaran bahasa Inggris bagi siswa sekolah dasar (SD). Bagaimana pendapat Anda?

Pemerintah jangan asal mewajibkan kebijakan tersebut untuk semua sekolah. Harus dilihat terlebih dahulu kemampuan dan kesiapan masing-masing sekolah. Jika dipaksakan berlaku secara nasional tanpa kesiapan dan dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan ini justru akan sia-sia.

Mengapa Anda berpandangan demikian?

Persoalan paling krusial dalam sistem pendidikan kita bukan semata-mata kekurangan guru secara nasional, melainkan ketimpangan mutu dan distribusi guru yang masih akut.

Mengapa kebijakan ini tidak bisa langsung diberlakukan di semua sekolah?

Sekolah-sekolah di kota besar mungkin memiliki ketersediaan guru yang lebih baik dan mudah mengakses pelatihan, baik secara daring maupun luring.

Namun, bagaimana dengan SD di luar perkotaan atau sekolah-sekolah di wilayah pinggiran? Di sana, jangankan memiliki guru bahasa Inggris, guru kelas saja masih banyak yang berstatus non-ASN dengan gaji di bawah standar.

Karena itu, Pemerintah harus melihat kondisi riil setiap sekolah sebelum menerapkan kebijakan secara menyeluruh.

Kemendikdasmen berencana melatih 100.000 guru untuk menunjang kebijakan tersebut. Apakah langkah ini cukup?

Kemendikdasmen tidak boleh berpuas diri hanya dengan mencetak sertifikat kelulusan pelatihan bagi 100.000 guru. Pelatihan tanpa kerangka penjaminan mutu *(quality assurance)* hanya akan menjadi pemborosan anggaran negara, baik APBN maupun APBD.

Karena itu, harus ada teori perubahan dan mekanisme penjaminan mutu yang jelas. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelatihan tersebut benar-benar berdampak terhadap kualitas pembelajaran di ruang kelas.

Apa catatan JPPI terhadap rencana pelatihan 100.000 guru tersebut?

JPPI mendukung prioritas peningkatan kompetensi guru. Namun, Pemerintah juga tidak boleh melupakan pekerjaan rumah terkait kesejahteraan guru. ■ REN